

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia diharapkan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan, karena hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu dialokasikan belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran hal ini dikemukakan oleh Christy et al (2009). Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan di suatu wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak.

IPM atau disebut juga sebagai Human Development Index (HDI) merupakan sebuah index komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketrampilan serta mempunyai pendapatan untuk hidup layak (Badan Pusat Statistik/BPS, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pada tahun 2020 IPM Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 189 negara yang terdaftar dalam UNDP (UNDP, 2020) dan menempati peringkat kelima dari sepuluh negara ASEAN. Pandemi COVID 19 telah menyebabkan berbagai masalah pembangunan di seluruh dunia. Berdasarkan fenomena tersebut kemunduran dan ketimpangan terjadi di berbagai aspek kehidupan dalam waktu yang singkat. IPM dan keterkaitannya dengan kemiskinan Manusia merupakan kekayaan suatu negara.

Penurunan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia di skala Internasional, dipengaruhi oleh perkembangan IPM di dalam negeri seperti eksklusif perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia (UNDP, 2017). Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan metodologi perhitungan IPM. Perubahannya adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada metode baru. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada metode lama diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) pada metode baru. Perhitungan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik pada metode baru. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pembangunan manusia menengah dan menduduki peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut. Berdasarkan data BPS, IPM dalam tingkat nasional dan provinsi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Indeks Pembangunan Manusia

No	Kab/Kota	Tahun									
		2016	2017	int	2018	int	2019	int	2020	int	2021
1	Kota Kupang	78.14	78.25	0.11	78.84	0.59	79.55	0.71	79.71	0.16	79.74
2	Kab.Kupang	62.39	62.79	0.40	63.55	0.76	64.43	0.88	64.32	-0.11	64.41
3	Timor Tengah selatan	60.37	61.08	0.71	61.58	0.50	62.33	0.75	62.15	-0.18	62.16
4	Timor Tengah Utara	61.54	62.03	0.49	62.65	0.62	63.34	0.69	63.53	0.19	63.69
5	Belu	61.04	61.44	0.40	61.86	0.42	62.54	0.68	62.68	0.14	62.77
6	Malaka	58.29	58.9	0.61	59.66	0.76	60.34	0.68	60.21	-0.13	60.42
7	Rote Ndao	59.28	60.51	1.23	61.51	1.00	62.22	0.71	62.39	0.17	62.60
8	Sabu Raijua	54.16	55.22	1.06	55.79	0.57	56.66	0.87	57.02	0.36	57.03
9	Alor	58.99	59.61	0.62	60.14	0.53	61.03	0.89	61.33	0.30	61.37
10	Sumba Barat	61.85	62.3	0.45	62.58	0.28	63.56	0.98	63.53	-0.03	63.83
11	Sumba Timur	63.22	64.19	0.97	59.49	-4.70	65.34	5.85	65.52	0.18	65.74
12	Sumba Tengah	58.52	59.39	0.87	60.07	0.68	61.01	0.94	61.53	0.52	61.80
13	Sumba Barat Daya	61.31	61.46	0.15	61.89	0.43	62.60	0.71	62.28	-0.32	62.29
14	Lembata	62.81	63.09	0.28	63.96	0.87	64.91	0.95	64.74	-0.17	64.75
15	Flores Timur	61.90	62.89	0.99	63.55	0.66	64.34	0.79	64.22	-0.12	64.22
16	Sikka	62.42	63.08	0.66	63.89	0.81	64.75	0.86	65.11	0.36	65.41
17	Ende	65.74	66.11	0.37	66.62	0.51	67.20	0.58	67.04	-0.16	67.30
18	Ngada	65.61	66.47	0.86	67.1	0.63	67.76	0.66	67.88	0.12	67.88
19	Manggarai	61.67	62.24	0.57	63.32	1.08	64.15	0.83	64.54	0.39	65.01
20	Manggarai Barat	60.63	61.65	1.02	62.58	0.93	63.50	0.92	63.89	0.39	64.17
21	Nagekeo	63.93	64.74	0.81	65.35	0.61	65.88	0.53	65.81	-0.07	65.82
22	Manggarai Timur	57.50	58.51	1.01	59.49	0.98	60.47	0.98	60.85	0.38	61.37
	Provinsi NTT	61.88	62.54	0.67	62.98	0.43	64.00	1.02	64.10	0.11	64.26

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2017 (data diolah)

Data Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi NTT dari tahun 2017-2021 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun, jika diperhatikan dengan lebih seksama, interval perubahan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota sejak tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah Provinsi NTT belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia..

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bifel (2018) menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal kab/kota se-daratan timor, Provinsi NTT rata rata berada pada posisi 7,50% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata sebesar 9,66%, artinya kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mendukung otonomi daerah masih sangat rendah.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia dapat mengukur tingkat kesejahteraan, baik dari sisi sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, indeks harapan hidup (*longevity*) dalam perhitungannya menggunakan data anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH), serta indeks pengetahuan atau pendidikan (*knowledge*) dalam perhitungannya menggunakan data angka harapan anak sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dari sisi ekonomi, standar hidup layak (*decent living*) dalam perhitungannya menggunakan data nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Timbulnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Oleh sebab itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang tepat, terutama bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Bersamaan dengan semangat otonomi daerah ini, banyak studi yang menganalisis tentang keberhasilan pembangunan daerah melalui berbagai

indikatornya, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta melalui peningkatan Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dan penyelenggaraan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah di daerah. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), karena pemerintah daerah (*local government*) akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan mandat undang undang (UU), yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sejak berlakunya kedua regulasi tersebut, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola berbagai sumber dayanya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat, seperti dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah merupakan pengukuran kinerja keuangan daerah yang menggunakan pendapatan daerah khususnya PAD sebagai alat ukurnya.

Besarnya rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan kecilnya rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki arti bahwa suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja daerahnya dengan menggunakan PAD sebagai komponen utama sumber pendanaannya. Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Waluyo (2007) menyatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat. Selain itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut (Muluk, 2005).

Perkembangan kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yaitu dengan presentase berturut-turut selama 5 tahun sebesar 27,01%, 28,70%, 34,45%, dan 40,53%. Hal ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori yang sangat tinggi dan pemerintah pada provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat.

Rasio Derajat Desentralisasi Badan Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017-2021 dapat dikatakan cukup yaitu dengan rasio diatas 20% dengan presentase berturut-turut selama 5 tahun sebesar 21,18%, 22,21%, 24,20%, 25,11% dan 28,43%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT setiap tahunnya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lima tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi rasio rata-rata yaitu 74,77%. Rasio ketergantungan mengalami penurunan berturut-turut selama lima (5) tahun yaitu sebesar 78,42%, 77,37%, 75,06%, 72,87% dan 70,13%. Dimana kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi NTT sudah bisa mengelola dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya namun pemerintah daerah sendiri masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari Pemerintah Pusat.

APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran pendapatan yang tercantum dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat perencanaan pembangunan, IPM dapat digunakan sebagai tuntunan dalam menentukan prioritas saat merumuskan kebijakan dan menentukan program hal ini di kemukakan oleh Budiriyanto (2011).

Pemerintah daerah memiliki peran dalam menggunakan pendapatan daerahnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Arsyad (1999;103) menjelaskan pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya lokal yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pengelolaan sumber daya lokal merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam atau pertumbuhan endogen (*endogenous growth*). Model pertumbuhan endogen menerangkan peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung terhadap manusia (*human capital*).

Pemerintah daerah dalam menuangkan kebijakan publiknya di daerah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM. Ketidakkonsistenan peningkatan IPM kabupaten/kota di Provinsi NTT mengindikasikan pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT belum optimal digunakan untuk meningkatkan IPM. Pendapatan daerah merupakan kemampuan keuangan daerah yang antara lain berupa PAD. PAD seharusnya dikelola secara baik oleh pemerintah daerah dan pemanfaatannya benar-benar untuk anggaran yang produktif dan dapat dirasakan oleh masyarakat seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Halim (2007;231) salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan di daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sularso dan Restianto (2011) kinerja keuangan adalah

suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintahan, terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahan. Helfert (2000:49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur yang lainnya dalam laporan keuangan.

Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah dan IPM telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih et.al (2015) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan nyata pada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2001 sampai tahun 2011, dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, dan upaya pemungutan PAD sebagai indikator kinerja keuangan daerah. Anggraini (2015) meneliti pengaruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian oleh Batafor (2011) yang melakukan evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas,

rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia semakin menarik dan penting untuk dikaji, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali, khususnya faktor-faktor yang diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi NTT. Salah satunya adalah kinerja keuangan yang meliputi: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah, serta adanya dugaan bahwa kinerja keuangan daerah tidak serta merta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, namun kemungkinan adanya pengaruh variabel belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Peranan belanja modal sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu besarnya belanja modal suatu daerah diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah pada Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi NTT 2017-2021

No	Kab/Kota	Alokasi Belanja Modal (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Kupang	26.48	24.74	20.9	19.3	13.31
2	Alor	23.34	20.91	18.19	21.81	22.87
3	Belu	26.43	23.65	24.97	21.64	13.5
4	Ende	19.3	13.64	20.14	19.77	12.73
5	Flotim	15.59	21.71	18.03	12.38	12.98
6	Kab. Kupang	17.51	17.85	16.47	13.15	16.08
7	Lembata	19.69	25.25	28.99	19.02	15.92
8	Malaka	26.87	16.69	17.68	9.63	15.01
9	Manggarai	21.59	29.71	26.73	22.14	15.45
10	Manggarai Barat	25.78	24.2	25.63	18.61	18.33
11	Manggarai Timur	20.77	21.06	32.1	23.21	28.26
12	Nagekeo	25.82	20.96	31.11	20.09	26.87
13	Ngada	32.33	21.17	21.24	16.06	19.73
14	Rote Ndao	24.66	21.39	26.34	21.51	18.52
15	Sabu	21.01	27.51	24.09	23.83	24.72
16	Sikka	17.49	12.1	19.38	8.29	11.36
17	Sumba Barat	25.7	36.74	27.79	23.63	21.35
18	Sumba Barat Daya	30.79	19.41	22.27	20.63	19.38
19	Sumba Tengah	31.67	30.24	27.19	22.91	20.11
20	Sumba Timur	30.71	25.82	27.81	14.91	15.63
21	TTS	16.9	18.83	21.97	15.11	10.95
22	TTU	16.28	17.89	18.6	9.85	10.07
	Rata-Rata	23.49	22.34	23.53	18.07	17.42

Sumber: BPK RI Perwakilan NTT (data diolah)

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1.3 rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTT berada pada posisi 23.49% pada tahun 2017 dan 17,42% pada tahun 2021 artinya alokasi belanja modal pemerintah daerah Provinsi NTT masih berada dibawah rata-rata alokasi belanja modal pemerintah pusat sebesar 31,6% pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2017).

Berdasarkan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Apakah Secara Parsial Rasio Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
3. Apakah Secara Parsial Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
4. Apakah Secara Parsial Rasio Kemandirian Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
5. Apakah Secara Simultan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian Dan Alokasi Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel derajat desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel ketergantungan keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan manusia.
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan manusia.

5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, rasio Ketergantungan dan Alokasi belanja modal terhadap Indeks Pembangunan manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti yaitu :

1. Secara teoritis untuk menjelaskan penerapan desentralisasi fiskal dengan menggunakan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD dan pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam teori keagenan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan teori keagenan yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan, khususnya mengenai instrumen kebijakan fiskal di daerah yaitu APBD yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan manusia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian penelitian sebelumnya.
2. Secara praktis untuk memberikan kontribusi berupa informasi kepada pemerintah daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki dan pengalokasian belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.